

BAB 4

BAURAN KEBIJAKAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL: SINERGI MENDORONG PERTUMBUHAN LEBIH TINGGI DAN BERDAYA TAHAN

Transformasi sektor riil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Dalam kaitan ini, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional perlu ditempuh dan diarahkan pada 5 (lima) area penting. Pertama, sinergi untuk memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional dan transformasi sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Ketiga, sinergi kebijakan antara Pemerintah, KSSK, dan Bank Indonesia untuk meningkatkan berbagai sumber pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Keempat, sinergi kebijakan untuk mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia. Kelima, sinergi untuk meningkatkan efektivitas kerja sama perdagangan dan investasi bilateral dan regional.





Capaian kinerja dan kuatnya bauran kebijakan ekonomi nasional yang dicapai Indonesia selama ini merupakan landasan kuat ke depan untuk terus maju dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Seperti dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga di tengah rentetan badai gejolak global. Capaian pertumbuhan ekonomi termasuk salah satu yang terbaik di EMEs dengan siklus ekonomi dan keuangan yang sedang meningkat. Kuatnya bauran kebijakan ekonomi nasional melalui sinergi erat kebijakan fiskal Pemerintah dengan kebijakan Bank Indonesia serta koordinasi kebijakan dalam KSSK juga diakui dunia internasional. Transformasi sektor riil juga terus berlanjut dengan kebijakan industrial, termasuk hilirisasi sumber daya alam, serta kebijakan struktural untuk perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur, didukung oleh program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sinergi yang kuat dalam bauran kebijakan ekonomi nasional itu perlu semakin diperkuat ke depan.

Ke depan, sejumlah tantangan baik global maupun domestik perlu diantisipasi dalam penguatan sinergi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Dari sisi global, seperti dikemukakan dalam bagian pertama di atas, setidaknya ada 5 (lima) tantangan yang perlu dicermati. Pertama, berlanjutnya kebijakan proteksionis AS dan ketegangan geopolitik dunia menyebabkan semakin melebarnya fragmentasi perdagangan dan investasi antarnegara ke arah bilateral dan regional daripada multilateral. Kedua, melambatnya pertumbuhan ekonomi global disertai dengan pergeseran spasial pola pertumbuhan ekonomi antarnegara, termasuk dari AS dan Tiongkok ke Uni Eropa, India, dan sejumlah negara EMEs lainnya. Ketiga, besarnya utang publik dan tingginya suku bunga negara maju menjadi beban berat bagi negara *Emerging Markets and Developing Economies* (EMDEs) dalam kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan

ekonominya, bahkan untuk pembiayaan program sosial bagi rakyat. Keempat, tingginya kerentanan dan risiko di sistem keuangan dunia dari pelipatan transaksi produk-produk derivatif berbasis utang publik negara (*leveraging*), khususnya oleh NBFIs dengan pengaturan dan pengawasan yang masih lemah. Kelima, maraknya penerbitan dan perdagangan mata uang kripto dan aset keuangan digital (*stablecoin* dan tokenisasi aset) secara global oleh swasta yang belum ada pengaturan dan pengawasan dari otoritas negara yang berwenang, termasuk terhadap transaksi ilegal, perlindungan konsumen, dan keamanan siber.

Dari sisi domestik, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional perlu diperkuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan ke depan, termasuk memitigasi dampak dinamika global tersebut. Sinergi bauran kebijakan dimaksud perlu merespons setidaknya 5 (lima) tantangan berikut ini (Gambar 4.1.).

Pertama, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu tetap menjadi prioritas. Indonesia diakui internasional dalam kemampuan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ke depan, stabilitas ini semakin penting untuk mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan agregat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika perekonomian dan keuangan global yang terus berubah cepat dan penuh ketidakpastian. Stabilitas nilai tukar dan terjaganya inflasi yang rendah perlu terus dijaga. Defisit fiskal tidak lebih 3% PDB perlu dipertahankan. Ketahanan dan stabilitas sistem perbankan perlu terus diperkuat. Karenanya, koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia maupun koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu terus dipererat.

Kedua, transformasi sektor riil perlu dipercepat untuk meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan dalam negeri yang lebih tinggi. Ini sekaligus untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi sebagai pilar penting ketangguhan dan kemandirian ekonomi nasional. Kebijakan

Gambar 4.1. Lima Sinergi Bauran Transformasi Ekonomi Nasional



Sumber: Bank Indonesia

industrial dengan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam perlu menjadi prioritas industri strategis nasional, termasuk untuk mineral, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Indonesia sangat kaya sumber daya alam, namun selama ini kurang dioptimalkan dan bahkan sebagian dikelola secara ilegal. Hilirisasi dan industrialisasi perlu difokuskan pada peningkatan nilai tambah dengan produk-produk turunan dari sumber daya alam tersebut, seperti pada pengolahan kelapa sawit dan baterai litium. Pengembangan model bisnis yang menguntungkan secara komersial sangat penting agar menarik bagi penanaman modal, baik oleh Pemerintah melalui Danantara maupun swasta dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, kebijakan reformasi struktural untuk perbaikan iklim investasi, infrastruktur konektivitas, dan riset perlu terus dikembangkan untuk peningkatan daya saing dan produktivitas, baik modal, tenaga kerja, maupun inovasi dan efisiensi.

Ketiga, sumber-sumber pembiayaan perlu terus dikembangkan untuk mendukung program transformasi sektor riil, khususnya hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kebutuhan modal dan investasi sangatlah besar, yang tidak mungkin dibiayai dari APBN. Perlu kejelasan strategi pembiayaan nasional. APBN sebaiknya dioptimalkan untuk pembiayaan program sosial dan ekonomi kerakyatan dengan

batasan defisit tidak lebih dari 3% dari PDB, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Desa Nelayan. Sementara itu, kebutuhan modal dan investasi yang besar untuk proyek hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam dapat dibiayai dari Danantara, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta swasta dari dalam dan luar negeri. Jenis pembiayaan dapat berbentuk penanaman modal, kredit, serta penerbitan obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Pendalaman pasar keuangan sangatlah penting untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional, baik untuk peningkatan likuiditas, suku bunga yang kompetitif, maupun instrumen lindung nilai atas suku bunga dan nilai tukar. Bank Indonesia akan berkoordinasi erat dalam KSSK untuk pendalaman pasar keuangan dimaksud.

Keempat, digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional perlu terus diakselerasi untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berdaya tahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang cepat dalam digitalisasi, khususnya digitalisasi sistem pembayaran serta transaksi ekonomi-keuangan digital secara ritel. Kini QRIS, *Mobile Banking*, *E-Commerce*, dan BI-FAST semakin digemari masyarakat dan UMKM untuk kemudahan bertransaksi ekonomi dan keuangan sehari-hari secara cepat, mudah, dan biaya yang sangat murah, sehingga memperluas ekonomi dan



keuangan inklusif untuk rakyat. Demikian pula, digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah terus berkembang untuk meningkatkan penerimaan dan efisiensi pengeluaran anggaran di pusat dan daerah. Ke depan, digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan nasional perlu terus diakselerasi. Pengembangan usaha jasa berbasis digital di berbagai segmen ekonomi perlu terus diperluas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Digitalisasi sistem pembayaran baik secara ritel maupun nilai besar (*wholesale*) juga perlu terus dikembangkan, termasuk penerbitan dan pengembangan Rupiah Digital dan Aset Keuangan Digital oleh Bank Indonesia sesuai kewenangan UU. Kerja sama antarnegara untuk sistem pembayaran digital yang selama ini telah ditempuh juga perlu diperluas ke depan, termasuk konektivitas QRIS, BI-FAST, dan penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Transactions*, LCT) dalam penyelesaian transaksi perdagangan, investasi, dan keuangan.

Kelima, peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra utama. Seperti dijelaskan di atas, kebijakan proteksionis AS dan polarisasi ekonomi dunia antarnegara akan berlanjut. Karenanya, kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia perlu difokuskan pada negara-negara mitra utama yang paling menguntungkan secara bilateral dan regional, termasuk ASEAN+3 (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan), India, Timur Tengah, dan Uni Eropa, dengan tetap menyuarakan kerja sama multilateral. Kerja sama bilateral dan regional dimaksud juga penting dikaitkan dengan kepentingan Indonesia untuk perdagangan dan investasi yang mendukung program-program hilirisasi sumber daya alam dan kebutuhan pembiayaannya. Kerja sama dimaksud termasuk pula dalam hal memperluas penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Transactions*, LCT), pendalaman pasar keuangan, serta kerja sama sistem pembayaran digital

antarnegara dalam memfasilitasi kerja sama perdagangan dan investasi secara bilateral dan regional tersebut.

4.1.

Sinergi Memperkuat Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan

Bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan ke depan perlu terus diperkuat untuk tetap menjaga stabilitas dan mendukung pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Seperti dikemukakan di atas, risiko terhadap stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional dari dampak negatif rambatan global diperkirakan akan meningkat. Tingginya *yield* US Treasury dan suku bunga negara maju, volatilitas dan premi risiko di pasar keuangan dunia dapat menyebabkan aliran keluar investasi portofolio asing dan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia juga dapat terganggu baik karena terbatasnya surplus neraca modal dan finansial dalam NPI maupun menurunnya cadangan devisa karena kebutuhan untuk stabilisasi Rupiah. Pembiayaan defisit fiskal juga dapat terganggu karena meningkatnya *yield* SBN dan terbatasnya aliran investasi portofolio asing ke Indonesia. Dari sisi stabilitas internal, tekanan inflasi dapat meningkat karena kenaikan harga pangan di dalam negeri dan harga komoditas dunia, di tengah meningkatnya permintaan domestik. Demikian pula, dampak rambatan negatif global dapat meningkatkan risiko pasar (nilai tukar dan suku bunga), risiko likuiditas, dan risiko kredit pada sistem perbankan dan pasar keuangan Indonesia.

Koordinasi antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan KSSK yang selama ini berjalan erat perlu semakin diperkuat dalam perumusan dan pelaksanaan bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan ke depan di tengah berlanjutnya gejolak global. Koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dengan kebijakan



moneter dan makroprudensial Bank Indonesia perlu terus diarahkan untuk keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dengan perlunya mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan domestik baik konsumsi maupun investasi. Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dimulai dengan perumusan asumsi-asumsi makroekonomi dalam penyusunan APBN secara tahunan, khususnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga SBN. Koordinasi secara berkala dilakukan untuk asesmen dan proyeksi perkembangan ekonomi serta respons kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia yang perlu dikoordinasikan bersama. Koordinasi juga dilakukan dalam rencana penerbitan SBN (secara tahunan dan berkala) baik dari pasar global maupun domestik untuk pembiayaan defisit fiskal dengan suku bunga yang kompetitif, serta dengan tetap menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan. Sementara itu, koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan sekaligus mendorong pembiayaan dari sektor keuangan untuk pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui KSSK yang melakukan rapat berkala secara triwulanan. Selain asesmen, proyeksi, dan respons kebijakan masing-masing lembaga, rapat

KSSK juga membahas kerentanan dan risiko yang dapat muncul baik dari global maupun domestik serta respons kebijakan bersama yang perlu dikoordinasikan. Hasil rapat KSSK berkala secara triwulanan dikomunikasikan ke publik.

Kebijakan fiskal Pemerintah tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia. Sejalan dengan itu, kebijakan fiskal dirumuskan sebagai kebijakan *countercyclical* untuk merespons gejolak perekonomian global dan risiko ketidakpastian, serta menjaga perekonomian domestik dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makroekonomi yang mendasari APBN Tahun 2026 termasuk pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi dalam sasaran $2,5\pm 1\%$, rerata suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%, dan rerata nilai tukar Rp16.500 per dolar AS. Defisit fiskal dalam APBN 2026 tetap berhati-hati sebesar 2,68% PDB, untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas Indonesia secara internasional (Tabel 4.1.). Penerimaan negara naik sebesar 4,9% dari 2025 menjadi Rp3.153,6 triliun, terutama dari kenaikan penerimaan pajak. Belanja Pemerintah Pusat naik 16,6% menjadi Rp3.149,7 triliun,

Tabel 4.1. Pokok-Pokok APBN Tahun 2026

URAIAN (TRILIUN RUPIAH)	2025	2026
PENDAPATAN NEGARA	3.005,1	3.153,6
Penerimaan Perpajakan	2.490,9	2.693,7
Penerimaan Pajak	2.189,3	2.357,7
Kepabeanan dan Cukai	301,6	336,0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	513,6	459,2
BELANJA NEGARA	3.621,3	3.842,7
Belanja Pemerintah Pusat	2.701,4	3.149,7
Belanja K/L	1.160,1	1.510,5
Belanja non-K/L	1.541,4	1.639,2
Transfer ke Daerah	919,9	693,0
KESEIMBANGAN PRIMER	-63,3	-89,7
DEFISIT ANGGARAN	-616,2	-689,1
% Defisit terhadap PDB	-2,53	-2,68
PEMBIAYAAN ANGGARAN	616,2	689,1

Sumber: Kementerian Keuangan



KSSK

KOMITE
STABILITAS
SISTEM
KEUANGAN



Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS pada Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan IV 2025 yang diselenggarakan pada 31 Oktober 2025.

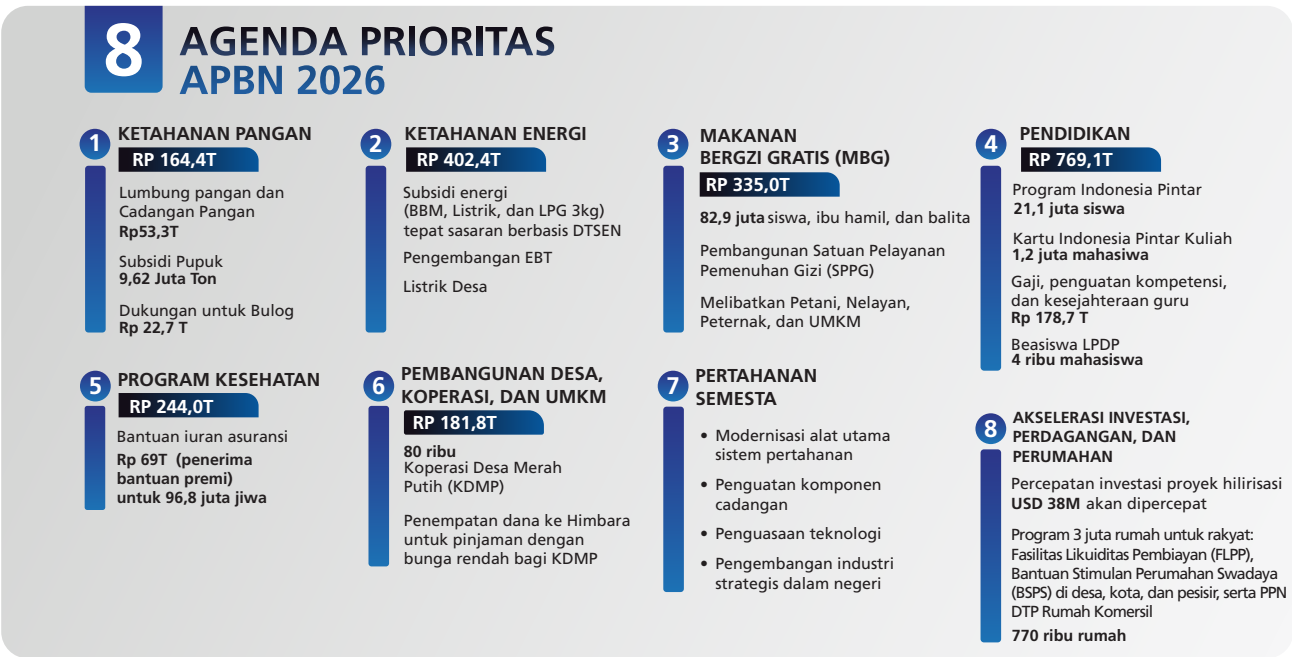
sementara transfer ke daerah dan dana desa turun menjadi Rp693,0 triliun atau 75,3% dari APBN 2025. Kenaikan belanja Pemerintah Pusat yang besar terutama untuk belanja barang dan belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari produksi dan investasi. Selain itu, stimulus fiskal juga diarahkan untuk mendorong konsumsi, termasuk kenaikan anggaran untuk bantuan sosial dan belanja lainnya nonkompensasi energi. Perlu dicatat bahwa kenaikan belanja lainnya nonkompensasi energi dimaksud sebagai alokasi untuk pendanaan program-program Asta Cita dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan lainnya, yang semula sebagai bagian dari alokasi anggaran dalam bentuk transfer ke daerah. Secara keseluruhan, alokasi anggaran dalam APBN 2026 tersebut sebagai kebijakan fiskal yang diarahkan dengan keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dengan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan anggaran untuk defisit fiskal tersebut sebesar Rp689,1

triliun diupayakan dari optimalisasi pinjaman program dan penerbitan SBN baik di pasar domestik maupun pasar keuangan global.

Dalam visi “Asta Cita” Pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menggariskan 8 (delapan) agenda program prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedelapan program prioritas itu sebagian pendanaannya mulai dimasukkan dalam APBN Tahun 2026 (Gambar 4.2.). Pertama, program ketahanan pangan dengan alokasi anggaran total sebesar Rp164,4 triliun, yaitu untuk lumbung pangan dan cadangan pangan, subsidi pupuk, dan dukungan untuk Bulog. Kedua, program ketahanan energi dengan alokasi anggaran total sebesar Rp402,4 triliun, yaitu untuk subsidi energi, pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dan listrik desa. Ketiga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita didukung dengan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan petani,



Gambar 4.2. Delapan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto



Sumber: Kementerian Keuangan

nelayan, peternak, dan UMKM. Keempat, program pendidikan dengan alokasi anggaran total sebesar Rp769,1 triliun, yaitu untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, peningkatan gaji dan kompetensi guru, serta beasiswa LPDP kepada 4 ribu mahasiswa. Pemerintah juga akan membangun Sekolah Rakyat dengan anggaran Rp24,9 triliun setiap tahunnya. Kelima, program kesehatan dengan alokasi anggaran total sebesar Rp244 triliun, yaitu untuk bantuan biaya asuransi kepada 96,8 juta jiwa. Keenam, program pembangunan desa, koperasi, dan UMKM dengan pendirian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan penempatan dana ke Bank Himbara untuk pinjaman dengan bunga rendah. Pada tahun 2026 direncanakan pendirian 27,7 ribu KDMP dengan pinjaman sekitar Rp83 triliun dan akan terus meningkat hingga 80 ribu KDMP dengan pinjaman total hingga mencapai sekitar Rp240 triliun pada tahun 2029. Ketujuh, program pertahanan semesta melalui modernisasi alat utama sistem pertahanan, penguatan komponen cadangan, penguasaan teknologi, dan pengembangan industri strategis dalam negeri. Kedelapan, program akselerasi investasi, perdagangan, dan

perumahan. Untuk perumahan, Pemerintah merencanakan membangun 3 juta rumah untuk rakyat dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir senilai Rp54,3 triliun pada 2026 dan ditingkatkan menjadi Rp111,9 triliun mulai tahun 2027. Pemerintah juga akan memberikan fasilitas PPN DTP Rumah Komersial untuk 770 ribu rumah. Untuk investasi, Pemerintah akan mempercepat investasi proyek hilirisasi senilai 38 miliar dolar AS yang pembiayaannya sebagian dari APBN dan sebagian lainnya dari Danantara dan swasta baik domestik maupun asing.

Dengan sinergi erat bersama kebijakan fiskal Pemerintah, kebijakan moneter Bank Indonesia tahun 2026 diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan tetap mencapai sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Hal ini terutama dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu: kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan pembelian SBN dari pasar sekunder. Pertama, dengan prakiraan akan terkendalinya inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2025 dan 2026, Bank Indonesia akan mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut untuk turut



meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,40% pada tahun 2026. Seperti dijelaskan sebelumnya, Bank Indonesia sejak September 2024 telah menurunkan BI-Rate sebanyak 6 (enam) kali sebesar 150 bps menjadi 4,75% hingga Oktober 2025. Bank Indonesia bersinergi dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan KSSK juga terus mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunganya dan mendorong penyaluran kredit/pembiayaan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kedua, stabilitas nilai tukar Rupiah akan terus dijaga sebagai bagian penting terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan maupun berkembangnya dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui intervensi Bank Indonesia baik di pasar valas luar negeri (*offshore* NDF) dan pasar domestik (*spot* dan DNDF). Ketiga, Bank Indonesia akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder sebagai bagian dari operasi moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti dijelaskan sebelumnya, hingga 31 Desember 2025 Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp332,14 triliun sejak Januari 2025, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program *debt switching* dengan Pemerintah sebesar Rp246,68 triliun. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga menyepakati sebagian dana dari pembelian SBN dimaksud dipergunakan untuk pembiayaan program perumahan rakyat dan program KDMP dalam Asta Cita Pemerintah dengan bunga yang murah. Selain melalui tiga instrumen di atas, koordinasi kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah juga sangat erat dalam pengendalian inflasi, khususnya untuk pengendalian harga-harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*) dan harga pangan yang bergejolak (*volatile food*) dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPI) baik di tingkat pusat maupun di berbagai daerah.

Sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia juga diperkuat untuk mendorong sektor-sektor ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penciptaan lapangan kerja yang besar. Dalam kaitan ini, melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM),

Bank Indonesia memberikan insentif tambahan likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sesuai dengan program-program dalam Asta Cita Pemerintah, sektor-sektor ekonomi dimaksud mencakup: (i) sektor pertanian, industri, dan hilirisasi sumber daya alam; (ii) sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif; (iii) sektor konstruksi, real estat, dan perumahan, termasuk perumahan rakyat; serta (iv) sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan. Seperti dijelaskan sebelumnya, hingga akhir Desember 2025, total insentif KLM mencapai Rp388,06 triliun, yang disalurkan ke sektor-sektor prioritas yakni sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Konstruksi, Real Estat, dan Perumahan, sektor pembiayaan inklusif UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan, serta sektor Jasa termasuk Ekonomi kreatif. Sementara itu, Pemerintah mendorong sektor-sektor prioritas itu melalui insentif fiskal dan kemudahan persyaratan yang diperlukan. Dalam penyaluran KUR, misalnya, Pemerintah menetapkan sektor mana yang dapat dibiayai, persyaratan, jumlah, dan insentif fiskal berupa subsidi bunga. Untuk program perumahan rakyat, Pemerintah memberikan insentif fiskal berupa subsidi suku bunga dan bantuan biaya administrasi yang jumlahnya disesuaikan dengan tipe rumah yang akan dibiayai. Sinergi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah seperti ini dapat meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar.

Sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diarahkan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan agar lebih berdaya tahan dalam menghadapi dampak rambatan global serta untuk mendorong pembiayaan perekonomian, termasuk keuangan inklusif dan hijau. Pertemuan KSSK (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS) dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk melakukan asesmen terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK) dan langkah

koordinasi kebijakan yang diperlukan. Fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada enam aspek penting, yaitu: (i) asesmen kondisi dan status SSK terkini serta koordinasi respons kebijakan yang diperlukan, (ii) koordinasi mendorong kredit dan pembiayaan sektor keuangan bagi perekonomian, (iii) koordinasi pengembangan pasar keuangan (termasuk edukasi dan literasi keuangan), (iv) koordinasi pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial (termasuk pengawasan risiko operasional dan serangan siber), (v) koordinasi penanganan dan resolusi permasalahan lembaga keuangan, serta (vi) koordinasi penguatan pengaturan dan ketentuan yang diperlukan, termasuk tindak lanjut implementasi UU P2SK (Gambar 4.3.). Dalam kaitan ini, seperti dijelaskan di atas, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah untuk memelihara SSK diarahkan pada terkendalinya inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, suku bunga dan penerbitan SBN untuk pembiayaan fiskal dari dampak negatif global. Untuk memelihara stabilitas sistem perbankan, koordinasi erat dilakukan antara pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dari keterkaitan makro-finansial pada bank-bank besar dengan pengawasan mikroprudensial OJK untuk menjaga kesehatan individual seluruh bank. OJK juga memperkuat pengawasan kepada lembaga keuangan nonbank, pasar modal, perusahaan *fintech*, dan perlindungan konsumen dalam jasa keuangan.

Penguatan penjaminan simpanan dan resolusi bank oleh LPS terus dilakukan, berkoordinasi erat dengan OJK dan Bank Indonesia sesuai kewenangan masing-masing. Simulasi kesiapan koordinasi antar empat lembaga KSSK dan secara bilateral dalam penanganan permasalahan sektor keuangan terus ditingkatkan. Lebih dari itu, koordinasi KSSK terus ditingkatkan untuk penyelesaian seluruh peraturan dan ketentuan sebagai tindak lanjut UU P2SK. Secara keseluruhan, implementasi UU P2SK ini semakin memperkuat pengembangan dan penguatan sektor keuangan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan perekonomian bagi pertumbuhan yang berkelanjutan ke depan.

Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia juga perlu terus dipererat dalam pengelolaan lalu lintas devisa bagi ketahanan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sebagai penguatan dari PP No. 36 Tahun 2023 untuk optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan DHE SDA bagi kemakmuran rakyat dan perekonomian nasional, melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Peraturan tersebut mewajibkan 100% pemasukan DHE

Gambar 4.3. Koordinasi Kebijakan KSSK Memelihara Stabilitas Sistem Keuangan

KOORDINASI KEBIJAKAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK)



Sumber: Bank Indonesia



SDA ke sistem keuangan Indonesia (dalam Rekening Khusus) untuk ekspor yang bernilai ≥ 250 ribu dolar AS, dengan penguatan pada ketentuan SDA Nonmigas yaitu kewajiban retensi yang sebelumnya sebesar 30% selama 3 bulan menjadi 100% (setelah pengecualian untuk konversi Rupiah, impor, pembayaran pinjaman, dividen, dan pajak valas) selama 12 bulan. Pemantauan atas implementasi PP No. 8 Tahun 2025 menunjukkan pemasukan DHE SDA ke Rekening Khusus (Reksus) berjumlah sekitar 11-12 miliar dolar AS/bulan, atau pada kisaran 87-89% terhadap total ekspor SDA berkisar 13-15 miliar dolar AS/bulan. Kepatuhan pemasukan dan penempatan DHE SDA oleh para eksportir, yaitu DHE telah masuk dalam waktu 3 bulan setelah tanggal ekspor, berjalan baik yaitu 94% pada nonmigas dan 100% pada migas. PP No. 8 Tahun 2025 juga cukup efektif meningkatkan pasokan valuta asing ke dalam negeri sejalan dengan kebijakan fleksibilitas konversi ke Rupiah. Hal ini selanjutnya mendorong peningkatan DPK Rupiah korporasi di perbankan dan pasokan ke pasar valuta asing di dalam negeri. Sejumlah langkah tentu saja dapat ditempuh untuk lebih mendorong pemanfaatan DHE SDA tersebut bagi perekonomian nasional. Dari sisi Bank Indonesia, penguatan kebijakan dapat ditempuh untuk optimalisasi penempatan DHE SDA di Bank Indonesia, baik dalam bentuk perluasan instrumen penempatan DHE maupun pemberian imbal hasil (pricing) yang lebih kompetitif. Langkah serupa juga dapat ditempuh Pemerintah antara lain melalui penerbitan SBN Valuta Asing di dalam negeri, khususnya dalam valuta nonUSD (seperti Yen dan Renminbi) yang sekaligus dapat memperluas penggunaan *Local Currency Transaction* (LCT) dalam kerja sama perdagangan dan investasi antarnegara.

4.2. Sinergi Mendorong Pertumbuhan Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan

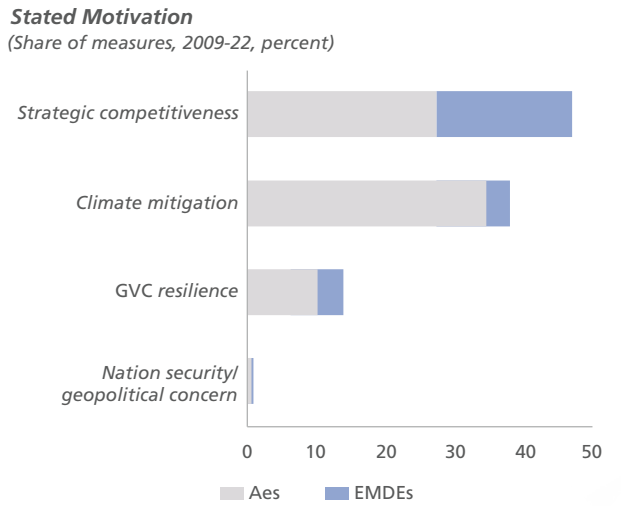
Sinergi kebijakan transformasi sektor riil sangat penting untuk mendorong kapasitas perekonomian nasional dalam mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Seperti dikemukakan di atas, sinergi antara kebijakan fiskal Pemerintah, kebijakan

moneter dan makroprudensial Bank Indonesia, serta koordinasi kebijakan dalam KSSK perlu terus dipererat untuk mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan agregat (pengeluaran konsumsi, investasi, dan ekspor neto) dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan, peningkatan kapasitas perekonomian dari sisi penawaran agregat dengan kenaikan nilai tambah produksi dari sektor-sektor ekonomi perlu terus dilakukan. Di sinilah sinergi kebijakan transformasi sektor riil sangat penting untuk terus meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas bagi kenaikan nilai tambah produksi dari sektor-sektor ekonomi tersebut. Kebijakan transformasi sektor riil perlu ditempuh baik melalui kebijakan reformasi struktural maupun kebijakan industrial. Kebijakan struktural diarahkan untuk perbaikan iklim investasi, persaingan usaha yang sehat, konektivitas infrastruktur (fisik dan digital), serta kebijakan perdagangan dan investasi (dalam negeri dan internasional) yang akan berdampak positif bagi produksi seluruh sektor-sektor ekonomi. Sementara kebijakan industrial diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produksi dari sektor-sektor ekonomi tertentu yang menjadi prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penciptaan lapangan kerja yang besar, termasuk di antaranya hilirisasi dan industrialisasi khususnya berbasis sumber daya alam. Dengan sinergi kebijakan makroekonomi untuk mendorong sisi permintaan agregat dan kebijakan transformasi sektor riil untuk mendorong sisi penawaran agregat tersebut maka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai dan berdaya tahan dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga.

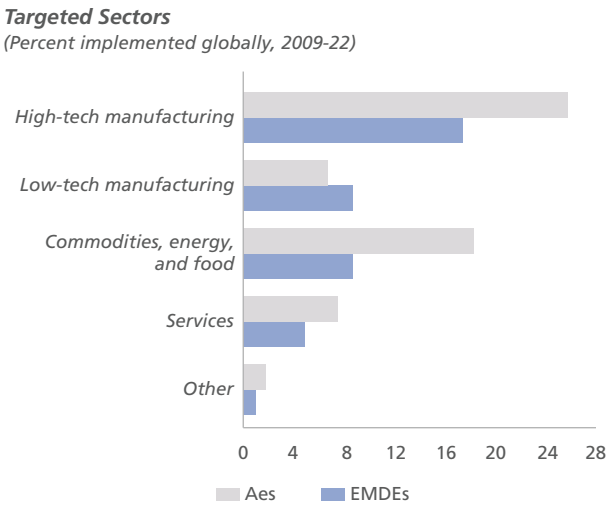
Sejak tahun 2009 semakin banyak negara yang menempuh kebijakan industrial untuk memperkuat ketahanan ekonomi, khususnya energi dan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kenaikan terutama di negara-negara maju, termasuk AS, Uni Eropa dan Kanada, serta sejumlah negara EMEs seperti Tiongkok.

Peningkatan signifikan terjadi sejak pandemi COVID-19 yang memperkuat kebutuhan akan pentingnya ketahanan energi dan pangan bagi perekonomian nasional. Secara umum, kebijakan industrial diartikan sebagai kebijakan yang ditempuh suatu negara untuk mengubah struktur ekonomi domestiknya melalui sejumlah instrumen termasuk pemberian subsidi dan fasilitas regulasi tertentu di bidang investasi, akses pasar, dan keuangan pada sektor atau komoditas yang menjadi prioritas nasionalnya. Pertimbangan ekonomi dapat didasarkan pada kebutuhan untuk koreksi atas kegagalan pasar seperti perlindungan pada industri pemula (*infant industry*) yang baru berkembang di dalam negeri dan belum mampu bersaing secara global. Pertimbangan untuk memperkuat daya saing strategis ini yang banyak ditemukan baik di negara maju maupun EMDEs, sementara pertimbangan untuk mitigasi iklim lebih banyak ditemukan di negara maju (Grafik 4.1.). Sementara itu, sektor-sektor yang menjadi target prioritas dari kebijakan industrial di negara maju lebih banyak di sektor manufaktur yang berteknologi tinggi, sektor komoditas, energi dan pangan, serta sektor jasa-jasa (Grafik 4.2.). Di negara EMDEs, sektor yang menjadi target kebijakan industrial bervariasi dari sisi sektor manufaktur hingga sektor komoditas, energi dan jasa-jasa, tergantung pada kesiapan kemampuan teknologi

Grafik 4.1. Kebijakan Industrial: Pertimbangan Ekonomi



Grafik 4.2. Kebijakan Industrial: Target Sektor Ekonomi



dan ketersediaan sumber daya alam yang dimilikinya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan industrial dapat ditempuh suatu negara untuk penguatan struktur ekonomi domestiknya bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Tentunya kebijakan industrial dimaksud perlu dirumuskan secara cermat dalam pemilihan sektor, pengembangan model bisnis, kebijakan investasi dan pembiayaan dengan mempertimbangkan keterbatasan pembiayaan fiskal Pemerintah. Lebih dari itu, kebijakan industrial harus disertai dengan kebijakan reformasi struktural untuk perbaikan iklim investasi, tata kelola konektivitas infrastruktur, hingga perlunya pengembangan pasar keuangan.

Di Indonesia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan, Pemerintah telah mencanangkan kebijakan transformasi sektor riil untuk pengembangan hilirisasi dan industrialisasi serta pembukaan lapangan kerja. Sesuai Prioritas Nasional kelima dalam Visi Asta Cita, pengembangan hilirisasi dan industrialisasi diarahkan untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pembiayaan dan investasi, serta infrastruktur penunjang, sementara pembukaan lapangan kerja diarahkan untuk pengembangan SDM lokal, transfer teknologi, dan pemerataan ekonomi (Gambar 4.4.). Untuk itu, arah kebijakan yang ditempuh mencakup:



Gambar 4.4. Kebijakan Transformasi Sektor Riil dalam Asta Cita: Mendorong Pertumbuhan Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan



Sumber: RPJMN (Bappenas)

Kebijakan transformasi sektor riil untuk pengembangan hilirisasi dan industrialisasi serta pembukaan lapangan kerja dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan

(i) percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor, serta (ii) aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi. Sasarannya adalah untuk: (i) peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan dengan target rasio PDB Industri Pengolahan meningkat dari 18,67% pada 2023 menjadi 21,90% pada 2029, serta (ii) peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global dengan rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat dari 29,3% menjadi 29,9% dari PDB, dan ekspor barang-jasa meningkat dari 21,7% menjadi 22,6% dari PDB pada periode yang sama.

Dari sisi kebijakan industrial, kebijakan transformasi sektor riil tersebut akan difokuskan pada hilirisasi komoditas SDA unggulan dan penguatan industri manufaktur prioritas. Dalam RPJMN, hilirisasi dan pengembangan industri berbasis SDA akan dilanjutkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (Gambar 4.5.). Hilirisasi SDA akan difokuskan pada komoditas unggulan yaitu: nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa,

Gambar 4.5. Komoditas Hilirisasi SDA Prioritas dalam RPJMN



Sumber: RPJMN (Bappenas)

dan rumput laut. Industri padat teknologi inovasi akan difokuskan pada pembangunan industri semikonduktor dan industri dirgantara, sementara industri dasar pada penguatan industri logam dasar, besi dan baja, serta pengembangan industri kimia. Sementara itu, penguatan industri manufaktur prioritas akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu industri berteknologi menengah-tinggi dan industri berteknologi rendah dan padat karya (Gambar 4.6.). Strategi industri dengan teknologi medium-tinggi difokuskan pada mobil, baterai listrik, petrokimia, dan semikonduktor. Strategi industri pendukung dengan teknologi rendah difokuskan pada produk SDA seperti nikel, bauksit, tembaga, timah, CPO, dan karet olahan untuk industri. Strategi industri padat karya dan produk unggulan daerah difokuskan pada garmen, sepatu olahraga, serta sejumlah produk perkebunan, pertanian, dan perikanan. Pemilihan strategi didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan adopsi teknologi, pembentukan mata rantai hilirisasi dan industrialisasi, serta ketersediaan eksplorasi dari komoditas SDA terkait.

Danantara memegang peran penting baik dalam implementasi model bisnis maupun investasi ke dalam proyek-proyek hilirisasi dan industrialisasi SDA tersebut. Dalam menentukan

prioritas, Danantara mempertimbangkan tiga pertimbangan utama, yaitu: kemampuan menghasilkan dampak terhadap ekonomi nasional, besarnya imbal hasil investasi yang berkesinambungan, serta peluang investasi yang dapat diwujudkan. Berdasarkan tiga pertimbangan dimaksud, Danantara menentukan 8 (delapan) sektor prioritas, yaitu: (i) sektor mineral pada komoditas nikel dan bauksit, (ii) energi terbarukan pada produk lanjutan migas, (iii) infrastruktur digital pada pusat data, (iv) kesehatan pada pembangunan fasilitas fraksionasi plasma darah dan mata rantai rumah sakit, (v) jasa keuangan pada sekuritisasi aset dan kredit, (vi) sarana dan prasarana pada pengolahan limbah dan infrastruktur pertambangan, (vii) pengembangan kawasan industri, serta (viii) pangan dan pertanian (Gambar 4.7.). Seperti dikemukakan di atas, pengembangan model bisnis yang menguntungkan secara komersial dari hilirisasi dan industrialisasi pada sektor-sektor prioritas tersebut sangat penting agar menarik bagi penanaman modal, baik oleh Pemerintah melalui Danantara maupun swasta dari dalam dan luar negeri.

Kebijakan reformasi struktural sangat penting untuk kesuksesan kebijakan industrial dengan hilirisasi dan industrialisasi SDA unggulan dan sektor-sektor prioritas nasional. Kebijakan industrial yang dirancang secara baik dan ditargetkan untuk mengatasi kegagalan pasar di sisi produksi dapat meningkatkan kinerja pada sektor yang diprioritaskan maupun secara agregat. Pengalaman Korea Selatan menggambarkan bahwa pemberian subsidi secara terarah dengan sasaran yang jelas dan diimplementasikan dengan tata kelola kelembagaan yang sehat dapat mendorong transformasi struktural di sektor-sektor seperti elektronik dan otomotif. Namun perlu diakui bahwa efektivitas kebijakan industrial sangat tergantung pada kemampuan dalam adopsi teknologi, kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta struktur persaingan pasar di negara bersangkutan. Itulah kenapa keberhasilan kebijakan industrial sangat memerlukan dan bahkan tergantung pada kebijakan struktural yang diarahkan pada untuk

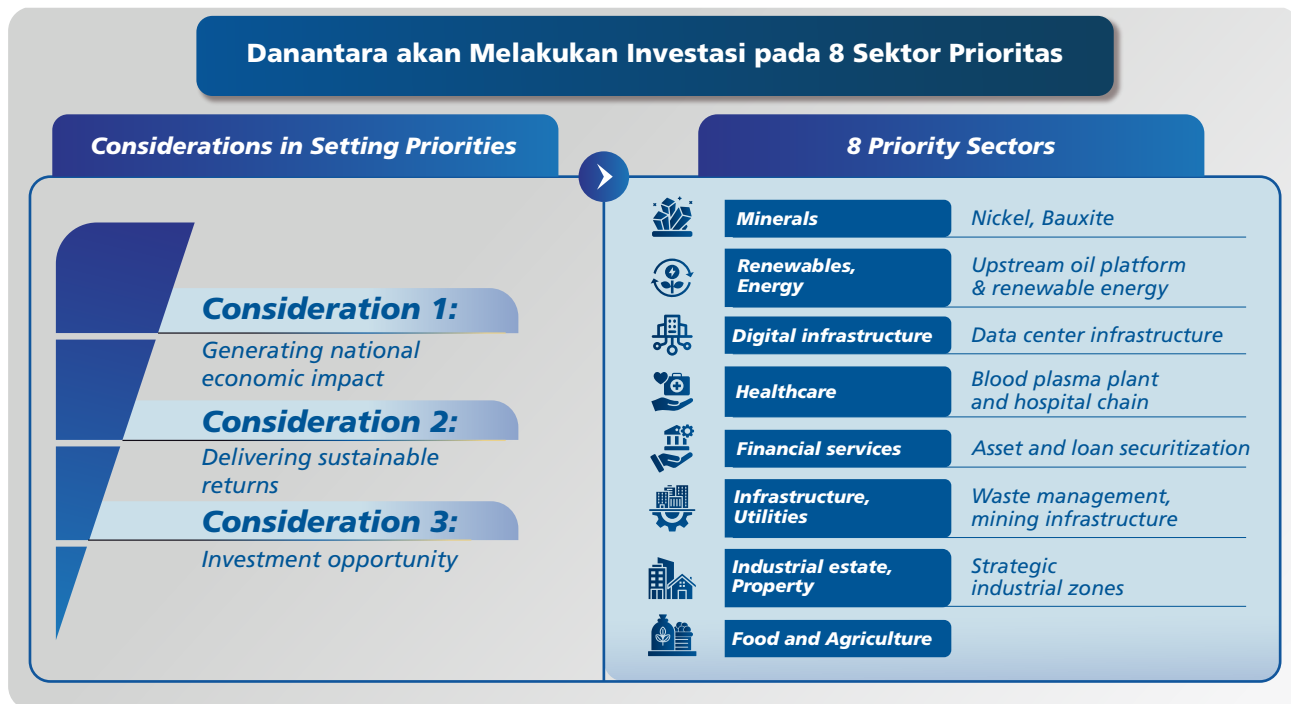
Gambar 4.6. Penguatan Industri Manufaktur Prioritas dalam RPJMN



Sumber: Bank Indonesia



Gambar 4.7. Investasi Danantara pada 8 Sektor Prioritas



Sumber: Danantara

perbaikan iklim investasi, persaingan usaha yang sehat, konektivitas infrastruktur (fisik dan digital), serta kebijakan perdagangan dan investasi (dalam negeri dan internasional) yang ditempuh negara yang bersangkutan. Seperti halnya kebijakan industrial, kebijakan struktural ditempuh untuk mengatasi berbagai hambatan terhadap pertumbuhan dan produktivitas. Bedanya, kebijakan struktural akan berdampak positif bagi produksi seluruh sektor-sektor ekonomi sementara kebijakan industrial lebih diarahkan pada sektor-sektor unggulan. Masalahnya, kebijakan struktural lebih sulit diimplementasikan karena ketergantungan pada birokrasi pemerintahan baik di pusat dan daerah. Untuk itulah kombinasi kebijakan reformasi struktural dan kebijakan industrial dapat menjadi pilihan. Langkah ini dapat ditempuh dengan menerapkan kebijakan industrial untuk mendorong produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor-sektor unggulan di kawasan ekonomi khusus sebagai pusat-pusat pertumbuhan, yang di dalamnya ditempuh kebijakan reformasi untuk perbaikan iklim investasi, infrastruktur konektivitas, perbaikan tata kelola dan birokrasi kelembagaan, serta pengembangan inovasi dan riset untuk

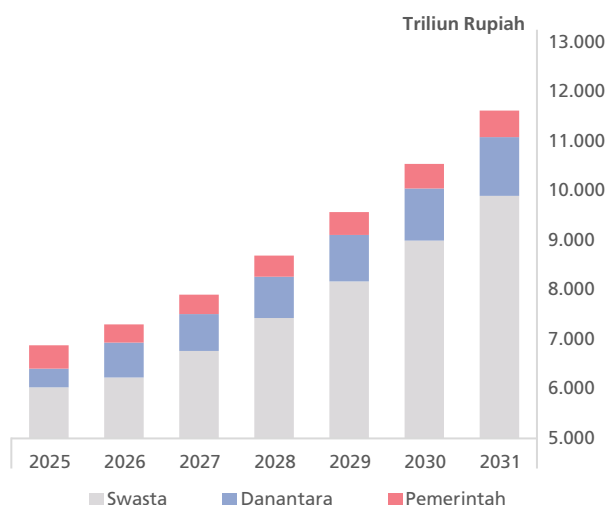
percepatan adopsi teknologi. Dalam kaitan ini, pengembangan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Batang, Sei Mangke, dan Weda Bay, sebagai pusat-pusat pertumbuhan untuk hilirisasi dan industrialisasi SDA dan sektor-sektor unggulan lain sebagai langkah kebijakan yang tepat dalam kombinasi kebijakan industrial dan kebijakan struktural tersebut.

4.3. Sinergi Meningkatkan Pembiayaan Perekonomian

Sinergi dalam meningkatkan pembiayaan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Seperti dikemukakan sebelumnya, kebutuhan modal dan investasi untuk program transformasi sektor riil, khususnya hilirisasi dan industrialisasi SDA dan sektor prioritas lainnya, sangatlah besar yang tidak mungkin berasal dari APBN. Karenanya, perlu kejelasan strategi pembiayaan nasional. Dalam kaitan ini, kebutuhan total investasi dari tahun 2025-2031 diperkirakan mencapai Rp62,54 ribu triliun, yaitu meningkat dari Rp6,88 ribu triliun pada 2025 menjadi Rp11,63 ribu triliun pada 2031 (Grafik 4.3.). Dari jumlah ini, dengan fokus anggaran untuk program sosial dan batasan defisit tidak lebih



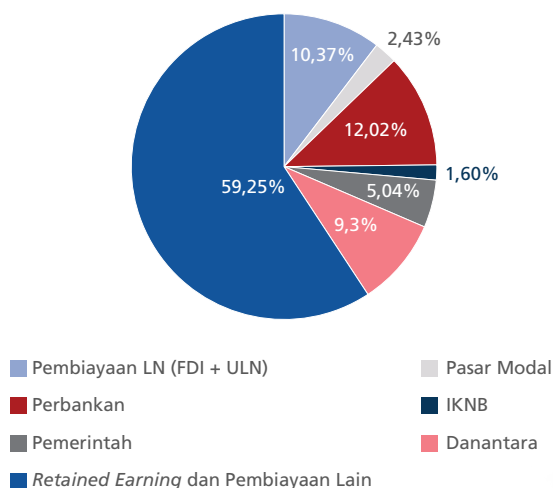
Grafik 4.3. Prakiraan Total Investasi dan Sumber Pembiayaan 2025–2031



Sumber: Bank Indonesia

dari 3% PDB, pembiayaan investasi dari APBN selama periode 2025-2031 tersebut diperkirakan berjumlah Rp3,15 ribu triliun (sekitar 5,0%). Sementara itu, pembiayaan investasi dari Danantara diperkirakan berjumlah Rp5,84 ribu triliun (sekitar 9,3%) selama 2025-2031. Kontribusi terbesar dari pemenuhan pembiayaan untuk kebutuhan investasi tersebut berasal dari swasta, yang diperkirakan berjumlah Rp53,56 ribu triliun (sekitar 85,6%) selama periode 2025-2031 tersebut (Grafik 4.4.). Di sinilah tantangan terbesar untuk keberhasilan implementasi kebijakan transformasi sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih

Grafik 4.4. Prakiraan Komposisi Sumber Pembiayaan Investasi 2025–2031



Sumber: Bank Indonesia

tinggi dan berdaya tahan tersebut. Tantangan ini semakin menuntut perlunya perumusan model bisnis yang jelas, tata kelembagaan yang kuat, dan kapabilitas adopsi teknologi dari program hilirisasi dan industrialisasi di atas sehingga secara komersial menguntungkan bagi penanaman modal swasta dari dalam negeri maupun investor asing.

Sinergi kebijakan Pemerintah, Danantara, KSSK dan Bank Indonesia perlu diperkuat untuk eksplorasi sumber-sumber pembiayaan dari swasta untuk pemenuhan kebutuhan investasi yang sangat besar ke depan. Dalam kaitan ini, sesuai dengan pola sumber pembiayaan untuk investasi usaha yang telah berjalan selama ini, sekitar 59,25% dari kebutuhan total investasi swasta tersebut (atau sekitar Rp37,1 ribu triliun selama 2025-2031) umumnya berasal dari dana sendiri, baik yang berasal dari laba yang disisihkan (*retained earning*) dan pembiayaan lainnya (Grafik 4.4.). Sumber pembiayaan berikutnya dari pembiayaan luar negeri baik dalam bentuk PMA atau pinjaman luar negeri, yaitu sekitar 10,37% (atau Rp6,5 ribu triliun selama 2025-2031), tambahan kredit/pembiayaan perbankan, yaitu sekitar 12,02% (atau Rp7,52 ribu triliun selama 2025-2031), dan selebihnya dari pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank. Untuk proyek-proyek baru dengan kontribusi pembiayaan dari dana sendiri lebih terbatas, pemenuhan kebutuhan investasi dari kredit/pembiayaan perbankan dan pembiayaan luar negeri tentunya akan lebih besar. Dengan demikian, sinergi kebijakan untuk mobilisasi pembiayaan dari empat sumber utama ini, yaitu dana sendiri, perbankan, PMA, dan anggaran Pemerintah perlu dioptimalkan untuk dapat mencapai pertumbuhan yang tinggi dalam lima tahun ke depan. Fokus sinergi terutama pada empat aspek, yaitu: struktur pembiayaan proyek yang optimal, sumber pembiayaan yang tepat, kebutuhan likuiditas dan lindung nilai, serta edukasi dan literasi keuangan. Kelayakan proyek investasi akan menentukan struktur pembiayaan yang optimal. Semakin menguntungkan suatu proyek investasi, struktur pembiayaan dapat berasal baik dari swasta seperti kredit/pembiayaan dari perbankan, penerbitan

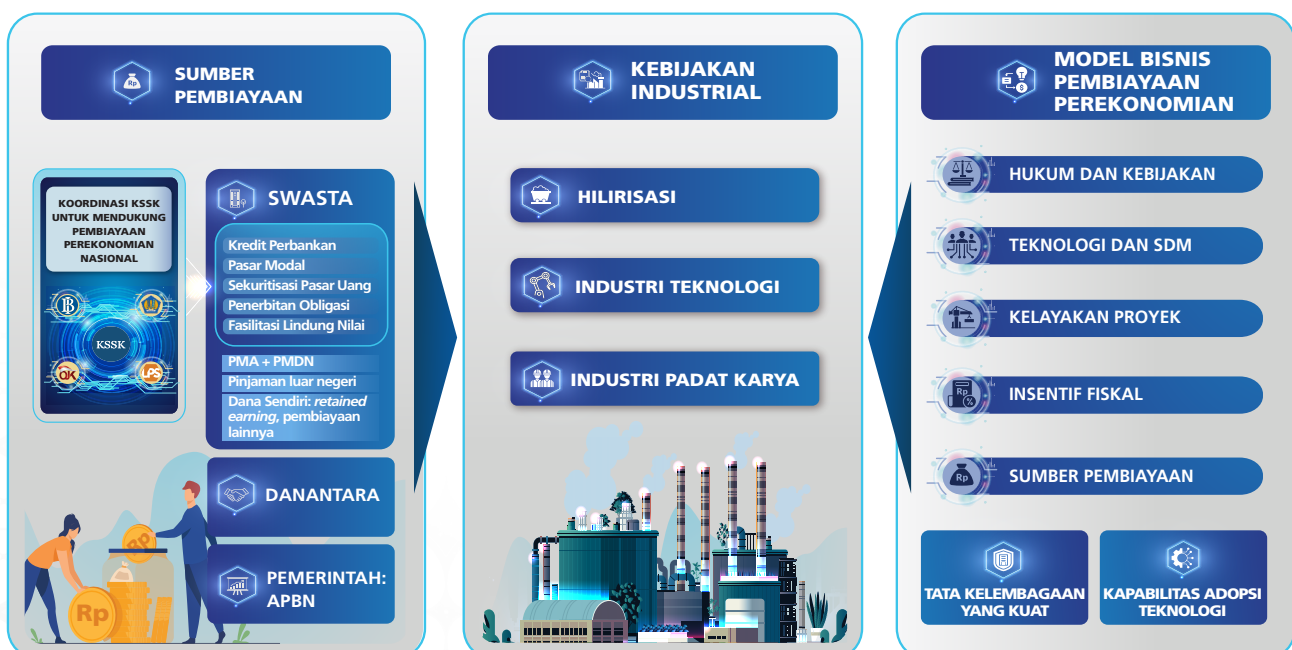


obligasi atau surat berharga lain di pasar modal dalam negeri, maupun pinjaman dari investor luar negeri. Sebagian proyek memberikan keuntungan secara komersial sehingga kebutuhan investasi swasta dapat sebagian besar dipenuhi dari swasta baik modal sendiri, kredit perbankan, maupun pinjaman dan penanaman modal asing. Namun, sebagian proyek lain masih memerlukan pembiayaan sebagian dan insentif fiskal dari Pemerintah untuk memperkuat kelayakan komersialnya. Insentif fiskal dan/atau kebijakan lain dari Pemerintah dimaksud termasuk tarif pajak, subsidi bunga, dan kepastian kebijakan Pemerintah, khususnya dalam masa tunggu (*grace period*) sejak tahap konstruksi sampai dengan tahap awal operasi. Sekali lagi, di sinilah sangat pentingnya perbaikan iklim investasi, reformasi birokrasi, dan studi kelayakan di atas (Gambar 4.8.).

Selanjutnya, sinergi antara Kemenkeu, OJK, LPS, dan Bank Indonesia untuk koordinasi dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dari sektor keuangan. Jenis pembiayaan dapat berbentuk penanaman modal, kredit, maupun penerbitan obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Pendalaman pasar keuangan sangatlah penting untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional, baik untuk peningkatan

likuiditas, suku bunga yang kompetitif, maupun instrumen lindung nilai atas suku bunga dan nilai tukar. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus mengimplementasikan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025-2030 baik pengembangan produk, *pricing*, pelaku, maupun infrastruktur. Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, selama implementasi BPPU 2020-2025 rerata nilai transaksi di pasar uang telah mencapai lebih dari Rp54 triliun per hari dan di pasar valuta asing lebih dari 10 miliar dolar AS per hari. Di samping itu, Bank Indonesia terus memperkuat menjalin sinergi dengan ketiga lembaga dalam KSSK tersebut untuk perumusan langkah bersama dalam pemenuhan sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan. Seperti dikemukakan di atas, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan insentif likuiditas KLM untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas pendukung pertumbuhan dan pencipta lapangan kerja tersebut. Selain koordinasi kebijakan makroprudensial dengan pengawasan mikroprudensial untuk optimalitas kredit dan terjaganya risiko sistem perbankan, sinergi Bank Indonesia dengan OJK terkait harmonisasi pengaturan penerbitan dan transaksi obligasi dan Surat Berharga Komersial (SBK) serta harmonisasi perizinan pasar keuangan seperti infrastruktur antarpasar dan profesi penunjang

Gambar 4.8. Model Bisnis Pembiayaan Perekonomian



Sumber: Bank Indonesia



di sektor keuangan. Selain koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dan makroprudensial seperti dijelaskan di atas, sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan juga terkait dengan pendalaman pasar obligasi Pemerintah (SBN) serta harmonisasi pajak transaksi keuangan baik di pasar modal maupun di pasar uang dan pasar valas (PUVA). Sinergi pengembangan pasar keuangan dalam KSSK dan dengan K/L, otoritas, dan pelaku terus dilakukan untuk inovasi instrumen pembiayaan ekonomi dan lindung nilai, seperti instrumen Surat Utang, *swap* suku bunga dan nilai tukar, dan optimalisasi transaksi mata uang lokal (LCT).

4.4. Sinergi Akselerasi Digitalisasi Ekonomi-Kuangan Nasional

Ekonomi Digital Indonesia memiliki potensi besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi baik dari sisi investasi maupun peningkatan produktivitas. Sesuai Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030, Indonesia berfokus pada pengembangan infrastruktur digital, transformasi digital sektor perdagangan (termasuk UMKM), adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), dan penyediaan layanan pemerintahan digital yang efisien. Tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai ekonomi digital Indonesia secara signifikan pada tahun

2030 dan memperkuat daya saing bangsa melalui inovasi dan kolaborasi digital. *Pertama*, strategi infrastruktur digital ditempuh melalui pengembangan infrastruktur fisik seperti jaringan fiber optik, menara *Base Transceiver Station* (BTS), dan satelit (termasuk Satria dan *low earth orbit*) untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). *Kedua*, mendorong transformasi digital di berbagai sektor, terutama perdagangan, dengan mendukung UMKM untuk naik kelas dan beradaptasi dengan ekosistem digital yang lebih luas. *Ketiga*, mempercepat adopsi teknologi inovatif seperti AI, komputasi awan (*cloud*), dan *fintech* untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. *Keempat*, strategi pemerintahan digital dengan memodernisasi layanan publik yang fokus pada layanan yang mudah diakses dan efisien, serta memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan *kelima*, strategi keamanan siber dan regulasi dengan membangun kerangka kerja regulasi yang mendukung inovasi digital sambil tetap melindungi konsumen dan kepentingan nasional, serta memperkuat keamanan siber untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Dengan implementasi strategi nasional ekonomi digital tersebut, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan melonjak dari 90 miliar



FEKDI 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia berkolaborasi dengan IFSE OJK dengan tema "Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia".



dolar AS pada tahun 2024 menjadi hingga 360 miliar dolar AS pada tahun 2030. Pertumbuhan ekonomi digital diharapkan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2030. Implementasi AI yang canggih diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan.

Bank Indonesia akan terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung Ekonomi-Kuangan Digital (EKD) nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif. Hal ini akan ditempuh melalui program-program dalam BSPI 2030 baik untuk pengembangan infrastruktur pembayaran (ritel, *wholesale*, dan data), penguatan industri, pengembangan inovasi, kerja sama internasional, dan pengembangan Rupiah Digital. Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan sektor keuangan sebagai *leverage* untuk meningkatkan produktivitas jasa pembayaran dan keuangan bagi perekonomian. Semakin meluasnya adopsi QRIS dan BI-FAST dalam melayani kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan dalam transaksi pembayaran digital sebagai kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Demikian pula berkembang pesatnya layanan perbankan digital melalui *online* dan *mobile banking*. Bank Indonesia juga akan mendirikan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) untuk memperkuat literasi dan akseptasi digital masyarakat. Elektronifikasi sistem pembayaran dalam penyaluran program-program sosial dan transaksi keuangan Pemerintah juga akan terus diperluas. Bank Indonesia turut memperkuat sinergi Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM) dengan PPATK, OJK, kementerian/lembaga terkait, industri sistem pembayaran dan perbankan, serta forum internasional guna memastikan integritas dan ketahanan ekosistem pembayaran nasional. Demikian pula, kerja sama bilateral dan internasional dalam sistem pembayaran antarnegara juga akan terus diperluas, tidak saja dengan negara ASEAN-5 tetapi juga dengan Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Arab Saudi, dan India.

4.5.

Sinergi Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Internasional

Sinergi peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra utama perlu ditempuh untuk kesuksesan kebijakan transformasi sektor riil¹³. Indonesia telah menjalin kerja sama ekonomi baik bilateral, regional maupun multilateral untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kerja sama regional, Indonesia berpartisipasi aktif dalam AFTA (ASEAN Free Trade Area) untuk memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan. Kerja sama bilateral dijalin Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara mitra dagang utama. Dengan Tiongkok, Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman strategis untuk investasi di sektor manufaktur, energi baru terbarukan, dan logistik. Kerja sama ini bertujuan untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan melibatkan UMKM dalam rantai pasok global. Kerja sama dengan Jepang meliputi investasi dalam industri, seperti pembangunan pelabuhan dan pabrik kendaraan, serta pertukaran pelajar di bidang teknologi. Dengan Korea Selatan, Indonesia menjalin kemitraan strategis khusus yang fokus pada pertahanan dan perdagangan, serta Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement*, IK-CEPA). Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Australia terkait perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama bisnis di berbagai sektor seperti infrastruktur, pertanian, dan sumber daya. Kerja sama dengan Swiss, hubungan kerja sama Indonesia mencakup perdagangan, investasi, pariwisata, dan pembangunan. Swiss adalah salah satu investor penting di Indonesia. Kerja sama Indonesia secara regional dan multilateral juga mencakup dengan Uni Eropa¹⁴, International Monetary Fund (IMF), G20, dan juga World Trade Organization (WTO). Seperti dijelaskan di atas, kebijakan proteksionis AS dan polarisasi ekonomi dunia

13 Penjelasan lebih rinci mengenai sinergi promosi investasi dan perdagangan dapat dilihat pada Boks 4.1. Sinergi Promosi Investasi dan Perdagangan untuk Memperkuat Perekonomian.

14 Penjelasan lebih rinci mengenai kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa dapat dilihat pada Boks 4.2. Kerja Sama IEU CEPA: Strategi Penguatan Kebijakan Perdagangan Internasional.

Gambar 4.9. Pengaruh Proyek Strategis Nasional terhadap Peningkatan Kapasitas Ekonomi Nasional



Sumber: Bank Indonesia, Rencana Kerja Pemerintah, diolah

antarnegara akan berlanjut. Karenanya, kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia perlu difokuskan pada negara-negara mitra utama yang paling menguntungkan secara bilateral dan regional, dengan tetap menyuarakan kerja sama multilateral. Lebih dari itu, kerja sama bilateral dan regional dimaksud juga penting dikaitkan dengan kepentingan Indonesia untuk perdagangan dan investasi yang mendukung program-program hilirisasi sumber daya alam dan kebutuhan pembiayaannya. Termasuk kerja sama dalam memperluas penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Transactions*, LCT), pendalaman pasar keuangan, serta kerja sama sistem pembayaran digital antarnegara dalam memfasilitasi kerja sama perdagangan dan investasi secara bilateral dan regional tersebut.

4.6. Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Menengah

Secara keseluruhan, kelima strategi bauran kebijakan ekonomi nasional di atas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dimaksud dapat berasal baik dari dorongan terhadap permintaan (*aggregate demand*) maupun dari

sisi peningkatan kapasitas penawaran nasional (*aggregate supply*). Secara khusus, kenaikan pertumbuhan yang signifikan dari sisi modal, tenaga kerja, dan produktivitas dapat berasal dari implementasi proyek-proyek strategis nasional seperti 79 proyek konektivitas dan kawasan, 90 proyek perumahan, sumber daya air, energi, dan pangan, 52 proyek peningkatan usaha, hilirisasi dan industrialisasi, serta 7 proyek sumber daya manusia¹⁵ (Gambar 4.9.). Seberapa jauh peningkatan pertumbuhan yang dapat dicapai akan tergantung pada kecepatan, ketepatan, dan efektivitas implementasinya. Dalam kaitan ini, tiga skenario dapat disimulasikan. Pertama, skenario "*Baseline*", dengan implementasi proyek-proyek yang *carry over*, sudah berjalan, dan sudah *groundbreaking*. Kedua, skenario "*Optimis*", yaitu skenario *Baseline* ditambah dengan implementasi proyek-proyek baru yang belum berjalan, belum *groundbreaking* dengan biaya relatif rendah dan kemungkinan pembiayaan cepat, termasuk yang bersumber dari APBN. Ketiga, skenario "*Super Optimis*", yaitu skenario *Optimis* ditambah

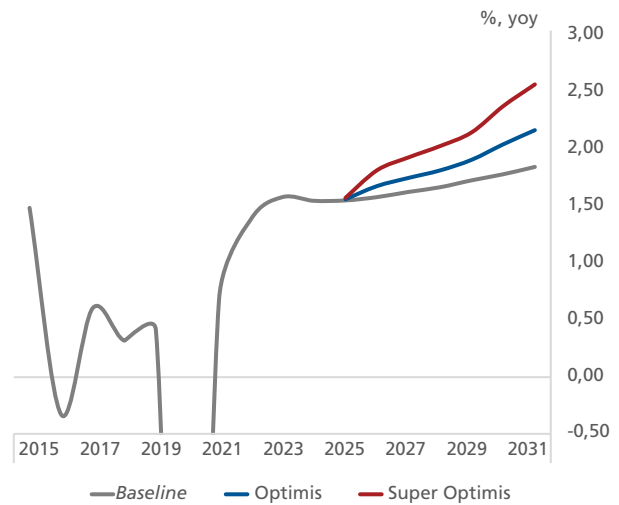
15 Penjelasan lebih rinci mengenai pertumbuhan signifikan dari sisi modal, tenaga kerja, dan produktivitas dapat dilihat pada Boks 4.3 Optimalisasi Program Strategis Nasional untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.



dengan implementasi proyek-proyek yang belum berjalan, belum *groundbreaking* dengan biaya relatif tinggi dan kemungkinan pembiayaan relatif lebih lama karena banyak bersumber dari swasta baik dalam maupun luar negeri. Tingkatan skenario juga menunjukkan intensitas pelaksanaan kebijakan reformasi struktural yang lebih kuat dari skenario sebelumnya. Kebijakan struktural dimaksud tecermin dari: (i) peningkatan “Produktivitas” melalui akselerasi pembangunan infrastruktur, kemampuan *research and development* dan adopsi teknologi, serta perbaikan *market efficiency*; (ii) peningkatan “Kapital” melalui perbaikan iklim investasi, peningkatan investasi PMA dan PMDN, dan dorongan pada sektor padat modal; serta (iii) peningkatan kualitas “Labor” melalui akses dan kualitas pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan penciptaan lapangan pekerja formal.

Ketiga skenario di atas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan dengan tingkat capaian yang berbeda. Kuncinya terletak pada kecepatan dan efektivitas implementasi berbagai program dan proyek Pemerintah dan swasta yang mampu mendorong pertumbuhan, baik dari sisi permintaan konsumsi dan investasi maupun peningkatan kapasitas perekonomian nasional. Kelima agenda kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut saling terkait dan mendukung kenaikan investasi dan modal, penyerapan tenaga kerja dan penghasilan masyarakat, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi perekonomian. Hal ini akan tecermin pada pertumbuhan produktivitas (*Total Factor Productivity/TFP*) yang terus meningkat, dengan peningkatan terbesar pada skenario Super Optimis dari kedua skenario lainnya (Grafik 4.5.). Artinya, dengan tingkat investasi modal dan penyerapan tenaga kerja yang sama, capaian pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentunya keseimbangan antara sektor padat modal untuk peningkatan kapasitas perekonomian (sisi penawaran agregat) dengan sektor padat karya untuk peningkatan penghasilan dan konsumsi (sisi permintaan agregat). Demikian pula, *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) akan menurun dengan penurunan terbesar pada Skenario Super

Grafik 4.5. Prakiraan Pertumbuhan Produktivitas: 2025–2031

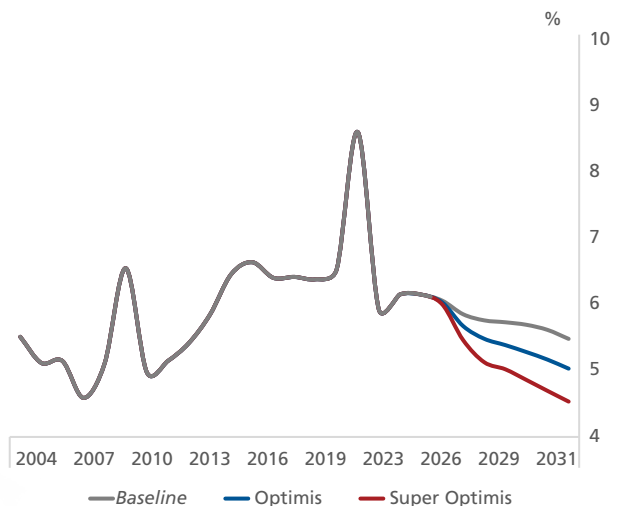


Sumber: Bank Indonesia

Optimis dibandingkan dengan kedua skenario lainnya (Grafik 4.6.). Dengan penurunan ICOR, perekonomian nasional menjadi lebih efisien karena untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi diperlukan nilai investasi yang lebih kecil.

Kenaikan produktivitas TFP dan penurunan ICOR dari implementasi bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut akan secara bersama meningkatkan capaian pertumbuhan yang tinggi dan berdaya tahan dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2025 sekitar 4,7-5,5% diperkirakan akan meningkat

Grafik 4.6. Prakiraan Penurunan ICOR: 2025–2031



Sumber: Bank Indonesia



menjadi 4,9-5,7% pada 2026 dan 5,1-5,9% pada 2027 (Tabel 4.2.). Dengan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2031 yang mencapai 5,6-6,4% untuk skenario “Baseline” diperkirakan dapat meningkat menjadi 6,1-6,9% pada skenario “Optimis” dan bahkan lebih tinggi lagi menjadi 6,9-7,7% pada skenario “Super Optimis”. Stabilitas harga tetap terjaga dengan inflasi tetap terkendali pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ dan transaksi berjalan tetap terjaga rendah yaitu sekitar defisit 0,4% s.d. surplus 0,4% dari PDB pada tahun 2031. Stabilitas internal dan eksternal ekonomi Indonesia ini dapat dicapai karena peningkatan sisi penawaran agregat yang dapat memenuhi kenaikan permintaan melalui bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut. Kredit/pembiayaan dari perbankan tumbuh optimal yaitu sekitar 12-16% per tahun. Defisit fiskal juga tetap terjaga pada tingkat di bawah 3% dari PDB sebagaimana telah menjadi kredibilitas Indonesia.

Sebagai catatan, simulasi capaian kinerja perekonomian sebagai hasil dari implementasi bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut perlu terus dievaluasi dengan dinamika yang berkembang dan respons bauran kebijakan yang diperlukan. Sejumlah asumsi mendasari simulasi ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia diasumsikan akan melambat dari 3,1% pada 2025 menjadi 3,0% pada 2030, dengan

suku bunga kebijakan moneter AS akan turun dari 4,0% menjadi 3,5%. Asumsi ini dapat saja berubah dengan berlanjutnya kebijakan tarif Pemerintah AS di bawah Presiden Trump. Dinamika geopolitik dan perekonomian dunia yang berubah cepat ini dapat berpengaruh pada stabilitas dan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, di samping program strategis Pemerintah dalam Asta Cita, peran swasta baik perusahaan besar maupun UMKM, ekonomi kreatif, sektor jasa ekonomi dan keuangan digital, dan pariwisata sangat penting untuk penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam kaitan ini, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan kepastian usaha menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang tak kalah penting adalah terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah membentuk kredibilitas bagi kinerja perekonomian Indonesia yang diakui secara internasional. Dalam kaitan ini, koordinasi erat antara kebijakan Pemerintah, kebijakan Bank Indonesia, dan kebijakan KSSK dalam menghadapi dinamika geopolitik dan perekonomian global yang berubah cepat sebagai prasyarat dan landasan bagi keberhasilan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Tabel 4.2. Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025–2031

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2031		
					Baseline	Optimis	Super Optimis
Pertumbuhan Ekonomi	%, yoy	4,7–5,5	4,9–5,7	5,1–5,9	5,6–6,4	6,1–6,9	6,9–7,7
Inflasi IHK	%, yoy	2,92*	$2,5 \pm 1$	$2,5 \pm 1$	$2,5 \pm 1$	$2,5 \pm 1$	$2,5 \pm 1$
Transaksi Berjalan	%PDB	0,3 s.d. -0,5	-0,1 s.d. -0,9	-0,4 s.d. -1,2	0,2 s.d. -0,6	0,3 s.d. -0,5	0,4 s.d. -0,4
Kredit Perbankan	%, yoy	9,69*	8–12	9–13	10–14	11–15	12–16

Keterangan: *merupakan angka realisasi
Sumber: BPS, Bank Indonesia, Proyeksi Bank Indonesia



Boks
4.1.

Sinergi Promosi Investasi dan Perdagangan untuk Memperkuat Perekonomian

Bank Indonesia bersinergi erat dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam mengelola persepsi pelaku ekonomi terhadap prospek ekonomi Indonesia melalui *linkage* Investor Relations Unit (IRU)- Regional IRU (RIRU)- Global IRU (GIRU). Sinergi diiringi dengan fasilitasi promosi investasi dan perdagangan melalui *linkage* IRU di tingkat pusat, RIRU daerah, dan GIRU. Hal ini dimungkinkan karena Bank Indonesia memiliki 14 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPw DN) sebagai RIRU dan lima Kantor Perwakilan Luar Negeri (KPw LN) sebagai GIRU. RIRU berperan membangun hubungan dengan pemilik proyek/produk di daerah, edukasi, serta mempersiapkan proyek dan produk potensial. Sementara itu, GIRU berperan membangun hubungan dengan investor, mitra dagang, lembaga keuangan internasional, serta perwakilan pemerintah dan asosiasi bisnis di luar negeri.

Promosi melalui *linkage* IRU-RIRU-GIRU didasarkan pada tiga prinsip utama. Pertama, *Synergized*, yaitu sinergi antarlembaga untuk efektivitas promosi. Sinergi diwujudkan melalui penguatan kerja sama antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, K/L (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan), serta perwakilan RI di luar negeri (Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Indonesia Investment Promotion Center, dan Indonesia Trade Promotion Center). Kedua, *Targeted*, yaitu program fasilitasi difokuskan pada subsektor prioritas dan negara mitra utama dengan nilai investasi tinggi atau memiliki perjanjian dagang dan keuangan dengan Indonesia. Ketiga, *Outcome Oriented*, yaitu mengarahkan strategi pada calon investor dan *buyer* dengan

potensi transaksi besar serta minat tinggi terhadap proyek investasi dan produk UMKM Indonesia.

Bank Indonesia sepanjang 2025 aktif menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fasilitasi promosi investasi dan perdagangan, yang akan dilanjutkan pada 2026. Bank Indonesia berpartisipasi pada sejumlah event di Asia, Australia, Eropa, dan AS. Pameran produk UMKM dan forum bisnis di Paviliun Indonesia pada World Expo Osaka, Jepang juga dilakukan Bank Indonesia. Partisipasi dalam ASEAN Conference 2025 di Singapura dan Shoppe Object 2025 di New York, AS juga dilakukan. Promosi investasi menghasilkan tindak lanjut konkrit di antaranya kesepakatan investasi pada proyek *Floating Solar Power Plant* di Lampung, *Waste Management System* di Kalimantan Selatan, Bolaang Mongondow *Refuse Derived Fuel* di Sulawesi Utara, Solar Power Plant dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Jawa Barat, dan *Mini Hydro* di Bengkulu. Sementara itu, promosi perdagangan menorehkan capaian antara lain ekspor biji kopi dan kontrak penjualan rempah-rempah dari *buyer* Jepang, serta kontrak ekspor pada pameran *Food Hotel Asia* di Singapura. Berbagai kegiatan akan terus dilanjutkan pada 2026 untuk mengundang lebih banyak investor dan mempromosikan produk UMKM binaan. *Linkage* IRU-RIRU-GIRU ke depan juga akan difokuskan pada promosi *green industry* dan *sustainable product*, sejalan dengan pergeseran preferensi investor dan *buyer* global menuju *green economy*.

Boks

4.2.

Kerja Sama IEU CEPA: Strategi Penguatan Kebijakan Perdagangan Internasional

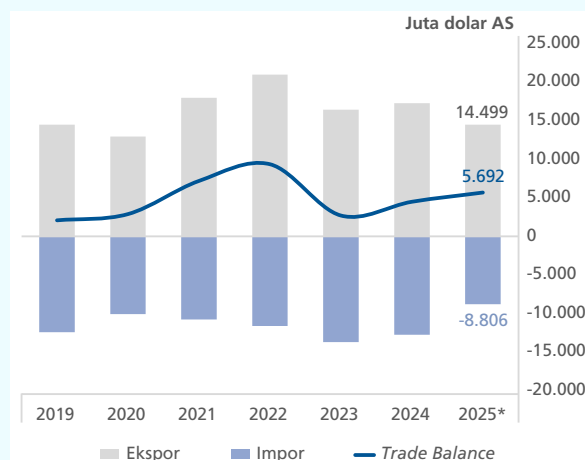
Tantangan perdagangan global akibat pengenaan tarif AS mendorong peran aktif Pemerintah dalam menjalin kerja sama perdagangan bilateral dengan negara-negara mitra utama, termasuk Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU-CEPA). Dalam kaitan ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani kesepakatan IEU-CEPA pada 23 September 2025, dan ditargetkan implementasi pada 2027 setelah memperoleh persetujuan dari 27 negara Uni Eropa dan proses ratifikasi di Indonesia. Otoritas Indonesia dan Uni Eropa berharap dapat meningkatkan transaksi perdagangan dan investasi seiring dengan diimplementasikannya perjanjian IEU-CEPA. Perjanjian IEU-CEPA memiliki ruang lingkup yang luas, termasuk perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi.

Komitmen perdagangan barang dalam IEU-CEPA meliputi tarif dan nontarif yang diharapkan dapat mendorong kinerja ekspor nasional. Dari sisi tarif, Indonesia dan EU berkomitmen menghapus tarif untuk 98% produk ekspor Indonesia menjadi 0%. Sekitar 80% produk akan langsung mengalami pembebasan tarif setelah perjanjian berlaku, sementara pengurangan tarif produk lainnya dilakukan bertahap. Pembebasan tarif juga diberlakukan pada produk ekspor utama Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, perikanan, alas kaki, pakaian, dan aksesoris. Sementara dari sisi nontarif, kedua pihak bersepakat menyederhanakan prosedur ekspor-impor serta mempererat kolaborasi otoritas kepabeanan. Kesepakatan IEU-CEPA diyakini dapat meningkatkan daya saing ekspor sejalan dengan akses pasar yang meluas. Pada

2024, nilai perdagangan Indonesia-Eropa mencapai 30,1 miliar dolar AS dengan surplus 4,5 miliar dolar AS bagi Indonesia. Surplus perdagangan Indonesia pada September 2025 kembali meningkat menjadi 5,7 miliar dolar AS (Grafik B4.2.1.).

Sejalan dengan komitmen tersebut, Indonesia dan EU sepakat untuk membuka akses pasar pada sejumlah sektor jasa strategis, antara lain jasa keuangan dan jasa profesional. Di sektor jasa keuangan, Indonesia memperoleh komitmen akses pasar baik untuk *insurance and insurance related services* maupun *banking and other financial services*. Komitmen meliputi empat mode penyediaan jasa, yaitu mode 1 (*cross-border*), 2 (*consumption abroad*), 3 (*commercial presence*), dan 4 (*movement of natural persons*). Perluasan akses pasar membuka peluang bagi pelaku di industri jasa keuangan Indonesia untuk beroperasi di Eropa. Uni Eropa juga menawarkan pasar yang besar bagi jasa profesional seperti

Grafik B4.2.1. Perkembangan Trade Balance Indonesia-Uni Eropa



*September

Sumber: Bank Indonesia



arsitektur, insinyur, serta teknologi informasi dan komputer. Melalui kesepakatan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA), kualifikasi profesional tenaga kerja Indonesia dapat diakui di negara-negara Uni Eropa.

Perjanjian IEU-CEPA memberikan kepastian investasi bagi pelaku bisnis Indonesia dan Uni Eropa. IEU-CEPA membuka akses pasar dan perlakuan yang setara bagi pelaku usaha kedua pihak. Selain itu, juga diatur aspek perlindungan investasi, transparansi regulasi tentang ketentuan dan perizinan, serta mekanisme penyelesaian *dispute*. Perjanjian ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor. Di satu sisi, kesepakatan tentang investasi pada IEU-CEPA dapat meningkatkan arus modal asing, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, perlu terdapat strategi untuk tetap melindungi pelaku usaha nasional dan penguatan kapasitas industri domestik untuk penetrasi ke pasar Uni Eropa.

Penandatanganan perjanjian IEU-CEPA merupakan salah satu langkah untuk mendorong kerja sama investasi dan perdagangan luar negeri Indonesia di tengah tingginya ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik yang masih berlangsung. Aspek penting yang perlu digarisbawahi adalah potensi besar kerja sama IEU-CEPA hanya akan terwujud jika Indonesia dapat memanfaatkannya secara optimal. Dalam jangka pendek, langkah kunci yang perlu dilakukan mencakup ratifikasi perjanjian serta diseminasi intensif kepada pelaku usaha. Dalam jangka menengah, reformasi struktural untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif menjadi prasyarat bagi peningkatan daya saing produktivitas agar dapat mengoptimalkan manfaat IEU-CEPA. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat berperan lebih besar dalam *Global Value Chain*. Pemanfaatan IEU-CEPA secara optimal diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berkesinambungan, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi.



Boks

4.3.

Optimalisasi Program Strategis Nasional untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Implementasi proyek-proyek strategis nasional dalam rangka transformasi sektor riil memegang peranan penting dalam meningkatkan potensial perekonomian nasional yang lebih tinggi. Secara konseptual, peningkatan potensial pertumbuhan perekonomian dapat dijelaskan melalui pendekatan *Solow Growth Model*. Berdasarkan pendekatan ini, sumber utama pertumbuhan ekonomi bergantung pada tiga komponen, yaitu kapital, produktivitas, dan tenaga kerja yang diasumsikan selalu digunakan secara penuh dalam proses produksi (*full employment*). Teori pertumbuhan *Solow Growth Model* dapat digambarkan dalam bentuk fungsi Cobb-Douglas sebagai berikut:

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$$

dimana Y_t : *Output* total pada periode t

K_t : Kapital pada periode t

L_t : *Labor* pada periode t

A_t : Produktivitas pada periode t

α : *Capital share of income*

Merujuk pada pendekatan *Solow Growth Model*, struktur komposisi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu diperkuat secara lebih seimbang. Perekonomian Indonesia selama 50 tahun terakhir lebih banyak bersumber dari faktor modal dan tenaga kerja dengan pangsa lebih dari 98%, sementara pangsa produktivitas, yang mencerminkan efisiensi ekonomi, masih di bawah 2% (Bappenas, 2025). Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5,03% (yoy) masih bersumber dari pertumbuhan kapital, produktivitas, dan tenaga kerja yang masih rendah (Laporan Perekonomian Indonesia, 2024). Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut

pada 2025. Oleh karena itu, kontribusi pertumbuhan kapital, produktivitas, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, diperlukan penguatan faktor-faktor utama pertumbuhan melalui kebijakan transformasi ekonomi. Studi Juhro dan Trisnanto (2018) menunjukkan bahwa strategi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu difokuskan pada penguatan faktor-faktor produksi. Pertama, memperkuat kapital melalui penciptaan sumber baru pertumbuhan ekonomi. Kedua, memperkuat *labor* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, meningkatkan produktivitas melalui pengembangan teknologi dan inovasi. Dalam hal ini, Pemerintah melakukan transformasi ekonomi nasional antara lain melalui berbagai proyek strategis nasional (PSN). Dari 228 PSN yang diimplementasikan oleh Pemerintah, sebanyak 142 proyek ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan kapital, 79 proyek untuk meningkatkan produktivitas, dan 7 proyek untuk meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja.

Secara teori, implementasi PSN akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Proyek-proyek strategis yang dilakukan Pemerintah meningkatkan kapasitas perekonomian melalui penguatan faktor kapital, produktivitas, dan tenaga kerja. Dengan demikian, *output* potensial akan meningkat pada jangka menengah-panjang sebagaimana dijelaskan dalam kerangka *Solow Growth Model*. Kerangka *Aggregate Demand-Aggregate Supply* (AD-AS) dapat digunakan untuk menjelaskan dampak implementasi PSN terhadap pertumbuhan



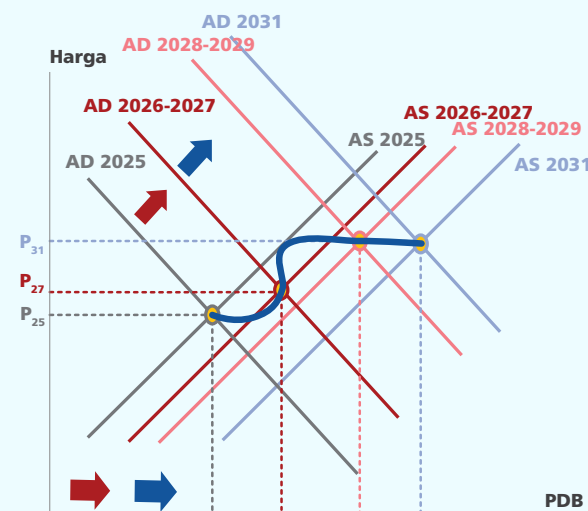
ekonomi melalui mekanisme penyesuaian antara permintaan dan penawaran agregat, serta implikasinya terhadap inflasi (Gambar B4.3.1.). Pada tahap awal implementasi proyek, peningkatan investasi untuk pengembangan proyek mendorong pergeseran kurva penawaran ke kanan yang akan meningkatkan *output* dan tekanan harga. Setelah itu, seiring dengan berjalannya proyek strategis yang menambah stok kapital, meningkatkan tenaga kerja, dan mendorong produktivitas, kurva penawaran agregat turut bergeser ke kanan. Pergeseran penawaran agregat tersebut memungkinkan tercapainya titik keseimbangan baru dengan tingkat *output* yang lebih tinggi dan laju kenaikan harga yang lebih rendah, sehingga tekanan terhadap inflasi dapat terkendali.

Penguatan sisi penawaran melalui peningkatan produktivitas, akumulasi kapital, dan tenaga kerja berdampak pada ekonomi yang lebih efisien dalam jangka menengah. Studi IMF (2015) dan World Bank (2020, 2022) menunjukkan bahwa lebih dari separuh variasi pertumbuhan dalam jangka menengah dijelaskan oleh

peningkatan faktor produktivitas, terutama pada negara yang melakukan investasi besar pada infrastruktur, konektivitas logistik, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks proyek-proyek strategis nasional, penguatan kapital dilakukan melalui peningkatan usaha, hilirisasi, dan industrialisasi, serta pembangunan perumahan, sumber daya air, energi, dan pangan. Sementara itu, peningkatan produktivitas tecermin dari peningkatan konektivitas dan kawasan, termasuk pembangunan infrastruktur digital. Perbaikan tenaga kerja dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia.

Proyek-proyek strategis nasional yang memperkuat produktivitas, kapital, dan tenaga kerja tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat stabilitas makroekonomi dan ketahanan eksternal. Peningkatan *output* potensial yang didorong oleh produktivitas, kapital, dan tenaga kerja menghasilkan pola pertumbuhan yang relatif tidak inflasioner (*non-inflationary growth*), sebagaimana ditunjukkan oleh temuan IMF (2015) dan Borio (2014). Dari sisi eksternal, perbaikan produktivitas dan kapasitas produksi meningkatkan daya saing ekspor serta menurunkan ketergantungan terhadap impor. Hal ini mendorong perbaikan *current account* (CA) dalam jangka menengah. Perbaikan CA selanjutnya memperkuat ketahanan eksternal melalui akumulasi cadangan devisa dan penurunan premi risiko yang berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar. Perbaikan CA juga mengindikasikan kesenjangan tabungan-investasi (*saving-investment gap*) yang membaik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal. World Bank (2022) menunjukkan bahwa negara dengan pertumbuhan berbasis produktivitas cenderung mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang bersifat *volatile*, dan lebih mampu membiayai investasi melalui sumber domestik dan aliran modal jangka panjang.

Gambar B4.3.1. Kurva Aggregate Demand-Aggregate Supply (AD-AS) – Gambaran Implementasi PSN, serta Dampaknya terhadap Output Potensial dan Inflasi



Sumber: Bank Indonesia